



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ASUMSI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Mei 2024, Menteri Keuangan telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025. Penyampaian dokumen KEM PPKF tersebut menandai rangkaian tahapan awal Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangannya Tahun Anggaran 2025.

Desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik. Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat sebagai *shock absorber* untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal.

Strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, serta penguatan konvergensi antardaerah.

Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen.

Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen KEM PPKF 2025 ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1-5,5 persen di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300-Rp16.000, sedangkan *yield* SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen.

Dalam pemaparannya pada Rapat Paripurna DPR RI, Menteri Keuangan menegaskan untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan *spending better* agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB. Pembahasan RAPBN 2025 antara Pemerintah dengan DPR yang akan dimulai di awal Juni 2024 dan akan menghasilkan UU APBN 2025 di akhir September atau awal Oktober 2024.

Atensi DPR

Indikator pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena akan memengaruhi indikator yang disusun dalam APBN 2025, termasuk di dalamnya indikator belanja dan juga indikator penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh seberapa mampu pemerintah baru menstimulasi pos-pos yang menjadi sumber pertumbuhan. Misalnya, untuk PDB dari sisi permintaan, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan konsumen rumah tangga di tahun depan. Masalah seperti keterbatasan insentif untuk kelas menengah akan menjadi tantangan dalam mencapai target pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, harapan berada pada investasi yang merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Tren investasi yang positif dalam beberapa tahun terakhir perlu dipastikan tetap terjaga, khususnya dalam konteks mengejar target pertumbuhan ekonomi.

Untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dikonstruksikan bukan hanya dari pemerintah, tapi seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Komisi XI DPR RI perlu mendorong dan mengawasi peran pemerintah dalam memfasilitasi dan memberikan stimulus untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Sumber

kemenkeu.go.id, 31 Mei 2024;
kompas.id, 5 Maret 2024;
kontan, 29 Mei 2024;
mediakeuangan.kemenkeu.go.id, 30 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.